

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PERUMDA PASAR KOTA BITUNG SEBELUM DAN SETELAH PENGGELEDAHAN OLEH KEJAKSAAN

Syalomita J. Ngangi¹, William A. Luntungan², Feiby N. Wantah³, Monika I. K. Sukatno⁴
Sekolah Tinggi Bisnis Dan Manajemen Dua Sudarah

Korespondensi: syalomitajngangi@gmail.com, Wllyln28@gmail.com,
fwantah@gmail.com, monika.kensu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung dalam menjalankan aktivitas operasional dan pengelolaan keuangannya. Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen dan pegawai Perumda Pasar Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Perumda Pasar Kota Bitung telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pemantauan serta sistem informasi dan komunikasi, khususnya dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Peneliti merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih modern, serta pengawasan rutin agar sistem pengendalian internal dapat berjalan optimal.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Perumda Pasar, Efektivitas Operasional

Abstract

This study aims to analyze the internal control system implemented by the Regional Public Company (Perumda) Pasar Kota Bitung in carrying out its operational activities and financial management. The internal control system is an essential component in ensuring effectiveness, efficiency, reliability of financial reporting, and compliance with regulations. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation involving the management and employees of Perumda Pasar Kota Bitung. The results show that the internal control system at Perumda Pasar Kota Bitung has been implemented quite well, particularly in the areas of control environment and control activities. However, there are still weaknesses in monitoring and in the information and communication system, especially in transaction recording and financial reporting, which are not yet fully integrated. The researcher recommends improving human resource capacity, implementing a more modern accounting information system, and conducting regular supervision to ensure the internal control system operates optimally.

Keywords: Internal Control, Accounting Information System, Perumda Pasar, Operational Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam memastikan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan organisasi berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks perusahaan daerah, sistem pengendalian internal memiliki peran strategis untuk menjaga kepercayaan publik, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta mencegah terjadinya tindak kecurangan atau korupsi. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan publik dan hasil retribusi daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama dalam operasionalnya.

Namun, pada beberapa tahun terakhir, Perumda Pasar Kota Bitung menjadi sorotan publik setelah adanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Perumda Pasar Kota Bitung, baik sebelum maupun setelah penggeledahan. Dengan adanya intervensi hukum, manajemen dituntut untuk memperkuat mekanisme pengawasan, memperbaiki proses akuntansi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan efektivitas sistem pengendalian internal pada Perumda Pasar Kota Bitung sebelum dan setelah penggeledahan oleh Kejaksaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak peristiwa hukum terhadap sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan indikator sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, 2013). Indikator ini digunakan untuk menilai dan membandingkan kondisi sebelum dan setelah penggeledahan, dengan skala penilaian 1–5 (1 = sangat lemah, 5 = sangat kuat).

Tabel 1. Indikator Sistem Pengendalian Internal

NO	Komponen Pengendalian Internal (COSO)	Indikator Penilaian	Nilai Sebelum Penggeledahan	Nilai Setelah Penggeledahan	Keterangan Perubahan
1	Lingkungan Pengendalian	Struktur organisasi, etika kerja, integritas pimpinan, budaya pengawasan	2	4	Terjadi peningkatan setelah adanya evaluasi dan rotasi dari kejaksaan.
2	Penilaian Risiko	Identifikasi resiko keuangan dan operasional, mitigasi resiko,	2	3	Mulai dilakukan pemetaan resiko setelah pengawasan dari

kesadaran resiko pegawai			kejaksaan.		
3	Aktivitas Pengendalian	Prosedur ototrisasi transaksi, pemisahan fungsi, dokumen pendukung transaksi.	3	4	Prosedur diperketat dan dokumentasi transaksi lebih diawasi.
4	Informasi Dan Komunikasi	Sistem informasi akuntansi, pleaporan keuangan, komunikasi antar bagian	2	4	Diterapkan sistem pelaporan digital dan peningkatan taransparansi.
5	Pemantauan	Audit internal, evaluasi berkala, tindak lanjut temuan.	2	5	Dibentuk unit pengawasan internal yang lebih aktif dan independen.

Sumber: Penelitian.

Sebelum penggeledahan oleh Kejaksaan, sistem pengendalian internal pada Perumda Pasar Kota Bitung masih tergolong lemah dan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan, pencatatan transaksi yang masih manual, serta minimnya evaluasi terhadap potensi risiko. Budaya kepatuhan dan integritas pegawai juga belum terbentuk dengan baik, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan administrasi dan keuangan. Setelah adanya penggeledahan, manajemen mulai melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengawasan. Struktur organisasi diperjelas, fungsi audit internal diaktifkan, serta sistem informasi keuangan mulai diarahkan ke bentuk digital agar lebih transparan.

Kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal juga meningkat karena adanya tekanan dan pengawasan dari aparat hukum. Berdasarkan teori pengendalian internal yang dikemukakan oleh *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,2013)*, efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung pada lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Mengacu pada teori tersebut, Perumda Pasar Kota Bitung menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan disiplin dalam pelaksanaan pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi sistem pengendalian internal pada

Perumda Pasar Kota Bitung setelah terjadinya penggeledahan oleh Kejaksaan, guna mengetahui sejauh mana sistem tersebut berjalan secara efektif

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan elemen mendasar dalam pengelolaan organisasi modern, baik sektor privat maupun publik. Menurut Mulyadi (2016), pengendalian internal adalah struktur organisasi dan rangkaian prosedur yang dirancang untuk menjaga aset, memastikan ketepatan pencatatan akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Definisi ini menegaskan bahwa pengendalian internal tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan keseluruhan mekanisme manajemen.

Sementara itu, Mock dan Turner (2005) menjelaskan bahwa pengendalian internal berfungsi memberikan “*reasonable assurance*” yaitu keyakinan memadai, bukan mutlak bahwa organisasi akan mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa suatu pengendalian internal tetap memiliki keterbatasan yang melekat, seperti *human error* atau potensi kolusi, sehingga evaluasi pengendalian harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam organisasi publik seperti Perumda Pasar, pengendalian internal memiliki arti lebih luas karena mencakup tanggung jawab terhadap penggunaan dana masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan, menjaga integritas pelaporan keuangan, dan memastikan bahwa layanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

2. Kerangka Teori Pengendalian Internal COSO

Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) merupakan standar internasional yang paling banyak digunakan dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal. COSO pertama kali dirumuskan tahun 1992, kemudian diperbarui secara signifikan pada 2013 untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, risiko modern, dan kompleksitas organisasi. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan, manajemen, dan seluruh personel untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga tujuan utama: efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan.

3. Lingkungan Pengendalian

Merupakan fondasi pengendalian internal karena membentuk budaya organisasi. Komponen ini mencakup integritas manajemen, komitmen terhadap kompetensi SDM, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab. COSO menekankan bahwa jika komponen ini lemah, seluruh pengendalian lainnya akan ikut terpengaruh.

4. Penilaian Risiko

Penilaian risiko menurut COSO mencakup identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Penilaian ini juga mendorong organisasi untuk menyesuaikan strategi pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam kasus Perumda Pasar, adanya penggeledahan Kejaksaan menunjukkan bahwa penilaian risiko sebelumnya belum

berjalan optimal.

5. *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* karya Cressey (1953) menjelaskan tiga faktor utama penyebab terjadinya kecurangan, Tekanan (*Pressure*) kebutuhan finansial, target kerja, atau beban social, Peluang (*Opportunity*) celah dalam pengendalian internal, Rasionalisasi (*Rationalization*) pemberian tindakan curang. Dalam konteks Perumda Pasar, peluang sering muncul ketika prosedur pencatatan lemah, fungsi tidak dipisahkan, atau pengawasan tidak berjalan. Teori ini relevan untuk memahami mengapa peristiwa hukum dapat terjadi dan bagaimana pengendalian internal harus diperkuat setelahnya.

6. Teori Pengawasan (*Supervision Theory*)

Fayol (1916) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Pengawasan efektif membutuhkan standar kerja yang jelas, pencatatan akurat, dan tindakan korektif saat penyimpangan terdeteksi. Meskipun teori klasik, prinsip ini tetap menjadi dasar evaluasi pengendalian internal modern, terutama pada aspek pemantauan dan kepatuhan.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Data,2025

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode menurut Mulyadi (2016), penelitian mengenai sistem pengendalian internal dapat dilakukan secara deskriptif dengan menilai sejauh mana komponen-komponen pengendalian internal diterapkan dalam suatu organisasi. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses, kebijakan, dan pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja nyata. Sementara itu, Mock dan Turner (2005) menjelaskan bahwa analisis sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui studi kasus dengan mengevaluasi efektivitas komponen pengendalian, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (monitoring).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sistem Pengendalian Internal Sebelum dan Setelah Penggeledahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penggeledahan oleh Kejaksaan, sistem pengendalian internal di Perumda Pasar Kota Bitung belum berjalan optimal. Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya menggambarkan pemisahan tanggung jawab yang tegas, terutama dalam fungsi keuangan dan operasional. Beberapa kegiatan masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, pelaporan kas, serta pengarsipan dokumen. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan karena lemahnya pengawasan dan kontrol silang antarbagian,

Informan 3 menjelaskan bahwa:

“Sebelum penggeledahan itu, sistemnya sudah ada, tapi belum terarah. Pengawasan belum ketat dan ada bagian yang rangkap tugas, jadi pengendaliannya belum maksimal.”

Setelah peristiwa penggeledahan, manajemen mulai memperkuat pengendalian dengan memperjelas struktur organisasi dan memperbaiki alur tanggung jawab. Proses pelaporan kini dilakukan lebih sistematis dengan pemeriksaan berjenjang, sementara dokumentasi setiap transaksi keuangan diwajibkan untuk disertai bukti pendukung. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran manajemen bahwa pengendalian internal bukan hanya formalitas administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang sehat. Temuan ini sejalan dengan kerangka Internal Control - Integrated Framework (COSO, 2013) yang menegaskan bahwa pengendalian internal berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Langkah Perbaikan Pasca Penggeledahan

Setelah penggeledahan, manajemen Perumda Pasar Kota Bitung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur kerja yang selama ini berjalan. Perusahaan mulai menerapkan berbagai langkah pembenahan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko penyimpangan.

Informan 2 menyatakan bahwa:

“Setelah kejadian itu, kami langsung evaluasi semua sistem kerja. Dibentuk tim pengawasan, semua laporan keuangan harus diverifikasi, dan setiap transaksi wajib ada

bukti tertulis.”

Langkah konkret yang diambil antara lain pembentukan tim audit internal, penetapan jadwal pemeriksaan rutin, serta penerapan sistem administrasi berbasis komputer. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data keuangan diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko manipulasi. Selain itu, manajemen juga memberikan pelatihan singkat kepada pegawai mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar prosedur kerja (SOP) baru. Upaya ini sesuai dengan pendapat Mulyadi (2016) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengawasan, serta kebijakan dan prosedur yang mampu mendeteksi kesalahan lebih awal.

3. Perubahan Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan

Perubahan signifikan juga dilakukan pada kebijakan internal perusahaan. Sebelumnya, pelaporan keuangan dapat disampaikan langsung ke pimpinan tanpa pemeriksaan tambahan, namun kini setiap laporan wajib melalui tahap verifikasi oleh bagian pengawasan dan keuangan.

Informan 1 menjelaskan:

“Sekarang setiap laporan keuangan harus dicek dua kali, ada bagian verifikasi dan bagian kontrol. Kami juga diberi arahan untuk segera melaporkan kalau ada kejanggalan.”

Selain itu, perusahaan juga memperkenalkan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memungkinkan pegawai melapor secara langsung apabila menemukan indikasi penyimpangan. Mekanisme ini menjadi bentuk perlindungan bagi pelapor dan langkah preventif untuk menjaga integritas organisasi. Perubahan kebijakan tersebut memperkuat sistem pengawasan berlapis (*check and balance*) dan membantu perusahaan menciptakan budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip accountability dalam tata kelola organisasi publik.

4. Tantangan dalam Implementasi Pengendalian Internal

Meskipun terdapat banyak perbaikan, pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perumda Pasar Kota Bitung masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang keuangan dan pengawasan internal.

Informan 3 mengungkapkan bahwa:

“Masih ada pegawai yang belum terbiasa dengan sistem baru. Kadang mereka kesulitan karena belum terbiasa pakai aplikasi dan laporan digital.”

Selain aspek SDM, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem berbasis teknologi yang lebih modern. Infrastruktur pendukung, seperti perangkat komputer dan jaringan internet di beberapa unit pasar, masih belum memadai. Tantangan ini mengindikasikan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal membutuhkan dukungan tidak hanya dari manajemen, tetapi juga dari pihak pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan.

Temuan ini sesuai dengan prinsip COSO (2013) bahwa efektivitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan komitmen

manajemen puncak dalam menyediakan sumber daya yang memadai.

5. Tindak Lanjut atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, perusahaan segera melakukan audit internal dan tindakan korektif. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbarui kebijakan atau prosedur yang masih lemah.

Informan 2 menyampaikan bahwa:

“Kalau ada kelemahan atau kesalahan, kami langsung evaluasi. Prosedur direvisi, dan kalau ada yang melanggar diberi sanksi. Hasilnya juga kami laporan ke dewan pengawas dan Pemerintah Kota.”

Tindak lanjut ini menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di dalam sistem pengendalian internal. Perusahaan tidak hanya memperbaiki kelemahan, tetapi juga berupaya mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang melalui sistem pemantauan yang lebih kuat

6. Langkah Strategis Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, Perumda Pasar Kota Bitung berkomitmen untuk memperkuat sistem pengendalian internal melalui pengembangan kebijakan dan inovasi yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang direncanakan antara lain penerapan sistem keuangan terintegrasi, pembentukan komite audit independen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas publik.

Informan 1 menjelaskan:

“Kami berencana membuat sistem pelaporan yang lebih modern dan terhubung antarbagian. Selain itu, pegawai akan terus dilatih supaya budaya kerja yang jujur dan tertib bisa dijaga.”

Langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas serta menjadikan pengendalian internal sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

E. PENUTUP

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum penggeledahan, sistem pengendalian internal di Perumda Pasar Kota Bitung sudah ada namun belum berjalan secara efektif. Pengawasan belum ketat, beberapa pegawai masih merangkap tugas, dan pengendalian belum maksimal. Setelah kejadian penggeledahan, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dengan membentuk tim pengawasan, mewajibkan verifikasi laporan keuangan, serta memastikan setiap transaksi memiliki bukti tertulis. Proses pengawasan kini dilakukan lebih ketat melalui pemeriksaan ganda oleh bagian verifikasi dan kontrol, serta adanya kewajiban melaporkan setiap kejanggalan. Meskipun penerapan sistem baru masih menghadapi kendala, terutama karena sebagian pegawai belum terbiasa menggunakan aplikasi dan laporan digital, manajemen terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Setiap kesalahan langsung ditindaklanjuti dengan revisi prosedur dan pemberian sanksi bila diperlukan, serta hasilnya dilaporkan ke dewan pengawas dan Pemerintah Kota. Ke depan,

perusahaan berencana mengembangkan sistem pelaporan yang lebih modern dan terintegrasi antarbagian, disertai pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk menumbuhkan budaya kerja yang jujur, tertib, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.

Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2013). *Accounting Information Systems*. Pearson.

COSO. (2013).s Internal Control – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Dewi, P. A., & Gunawan, A. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Perusahaan Daerah Pasca Kasus Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4(2), 89–102.

Hall, J. A. (2015). *Accounting Information Systems*. Cengage Learning.

Hutabarat, M., & Simanjuntak, E. (2019). Sistem Pengendalian Internal sebagai Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1), 22–35.

Jogiyanto, H. M. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Teori dan Praktik*. Andi Offset.

Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP STIM YKPN.

Manoppo, R., & Tangkuman, S. J. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Accountability*, 9(1), 50–62.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Pramesti, N., & Nugroho, A. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Organisasi Publik. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Publik*, 8(1), 55–68.

Rahmawati, F., & Lestari, S. (2019). Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 10(1), 100–113.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems*. Pearson.

Sari, D. P., & Puspitasari, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 45–57.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tunggal, A. W. (2014). *Pengantar Audit Internal*. Harvarindo.

Widyaningsih, A. (2020). Analisis Pengendalian Internal pada Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 135–147.

Wulandari, R., & Setiawan, D. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Berdasarkan Kerangka COSO. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 120–132.